



Korupsi Perjalanan Dinas DPRD

Januari Tetapkan Tersangka

MEMPAWAH- Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah membuktikan komitmennya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di masyarakat. Buktinya, sepanjang 2017 ini tercatat tujuh kasus korupsi yang sudah di meja hijaukan. Bahkan,

dalam waktu dekat Kejari Mempawah juga meram-pungkan penyidikan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Mempawah 2014-2016.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejari Mempawah, Dwi Agus Arfianto didamp-

ingi para Kasi saat melaku-kan ekspose kinerja Kejari Mempawah sepanjang tahun 2017 dalam rangka peringatan hari anti korupsi 2017, Jumat (8/12) di Kantor Kejari Mempawah.

• ke halaman 27 kolom 5



WAHYU/PONTIANAKPOST
ANTI KORUPSI: Kajari Mempawah, Dwi Agus Arfianto membagikan stiker dan PIN anti korupsi di Mempawah



Januari Tetapkan Tersangka

Sambungan dari halaman 17

Dwi mengungkapkan, berkenaan dengan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Mempawah tahun 2014-2016 itu sedang dalam tahapan penyidikan. Saat ini, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. Termasuk maskapai penerbangan yang digunakan para anggota dewan untuk melaksanakan perjalanan dinas. "Perkembangan terakhir dalam kasus ini, sudah kami lakukan ekspose kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Maka, kami pun masih menunggu penetapan kerugian negara dari BPK. Jika sudah ditetapkan, maka kita lanjutkan ke tahapan berikutnya," ungkapnya.

Dalam penyidikan kasus yang melibatkan para legislator DPRD Mempawah itu, Dwi mengaku menemukan sejumlah permasalahan dan kendala. Salah satunya berkaitan dengan data manifest yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan. Sebab, ada salah satu maskapai yang tidak beroperasi lagi.

"Ada tiga maskapai yang kita mintai keterangan yakni BA, LA dan SR. Namun, maskapai BA tidak bisa diperiksa lebih lanjut lantaran sudah tutup atau tidak beraktivitas lagi. Data yang masuk hanya menggunakan foto copy bukan asli. Sehingga tidak bisa kita lanjutkan," sebutnya. Namun, Dwi memastikan dua maskapai lainnya yakni LA dan SR tetap berlanjut untuk penyelidikan dalam kasus dugaan korupsi itu. Bahkan maskapai LA telah melengkapi semua berkas yang diminta oleh penyidik Kejari Mempawah. Sedangkan maskapai SR masih dalam proses perampungan administrasi yang dibutuhkannya.

"Kita fokus pada manifest maskapai LA dan SR. Sampai sekarang maskapai LA sudah memenuhi semua permintaan yang kita butuhkan. Bahkan dari pihak maskapai juga sudah di BAP. Untuk maskapai SR masih dalam tahap BPA dan sedikit lagi akan rampung," tuturnya.

Karenanya, Dwi berharap pada Januari 2018 nanti BPK telah melimpahkan

data kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Mempawah 2014-2016 itu. Sehingga, pihaknya dapat menentukan tahapan selanjutnya dan merampung seluruh berkas sebelum disidangkan. "Jika Januari nanti sudah ada pelimpahan dari BPK, maka kita bisa menetapkan tersangka. Karena, untuk menetapkan tersangka ini butuh dua alat bukti yang kuat. Kami belum bisa menyebutkan nama tersangka, yang pasti sudah teridentifikasi," pengkasnya sembari enggan menyebutkan pihak-pihak yang berpotensi terseret menjadi tersangka dalam kasus itu.

Dalam press release itu, Kejari Mempawah juga mengungkapkan bidang Pidsus telah melaksanakan penyelidikan terhadap 3 sprint perkara, penuntutan sebanyak 7 perkara, banding sebanyak 3 perkara dan 11 terpidana korupsi telah dieksekusi, serta kerugian uang negara yang diselamatkan total Rp 2,6 miliar lebih. (wah)